



## Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes

Eni Listiana, Siti Khumayah, Sri Wulandari

Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

\*Email: enilistiana\_79@yahoo.co.id

\*Correspondence: Eni Listiana

\*Correspondence: Eni Listiana

### ABSTRAK

#### Article Info:

Submitted:

02-05-2025

Final Revised:

08-05-2025

Accepted:

13-05-2025

Published:

14-05-2025

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Tanah dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitangga, Kabupaten Brebes, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi ini bertujuan untuk (1) menilai tingkat partisipasi, (2) mengidentifikasi faktor penghambat, dan (3) mengusulkan solusi untuk meningkatkan kepatuhan. Temuan mengungkapkan bahwa sementara wajib pajak memahami peraturan PBB-P2, kesadaran yang rendah dan ketidakpercayaan kelembagaan menghambat pembayaran tepat waktu. Hambatan utama termasuk kurangnya kepatuhan sukarela, sosialisasi yang tidak efektif, dan keterlibatan wajib pajak yang buruk dalam penetapan tarif. Studi ini menyoroti perlunya penjangkauan yang ditargetkan, penggunaan dana yang transparan, dan sistem pembayaran berbasis teknologi. Implikasi praktis menyarankan untuk mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pajak dan memanfaatkan pemimpin lokal untuk meningkatkan kepercayaan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur kebijakan pajak lokal dengan menerapkan teori partisipasi Putnam, menekankan dimensi sosio-perilaku yang sering diabaikan dalam studi fiskal.

**Kata kunci:** Partisipasi Masyarakat, Pajak Bumi, dan Pajak Bangunan

### ABSTRACT

*This research examines community participation in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Sitanggal Village, Brebes Regency, using a qualitative descriptive method with data collected through observations, interviews, and documentation. The study aims to (1) assess participation levels, (2) identify inhibiting factors, and (3) propose solutions to enhance compliance. Findings reveal that while taxpayers understand PBB-P2 regulations, low awareness and institutional distrust hinder timely payments. Key barriers include lack of voluntary compliance, ineffective socialization, and poor taxpayer engagement in rate-setting. The study highlights the need for targeted outreach, transparent fund usage, and technology-driven payment systems. Practical implications suggest integrating community participation in tax governance and leveraging local leaders to improve trust. The research contributes to localized tax policy literature by applying Putnam's participation theory, emphasizing socio-behavioral dimensions often overlooked in fiscal studies.*

**Keywords:** Community Participation, property tax

## PENDAHULUAN

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang paling dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Nur, 2015; Panawan & Kitta, 2023; Prakosa,

## **Eni Listiana, Siti Khumayah, Sri Wulandari**

Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes

---

2014; Putra & Ulupui, 2015; Riduansyah, 2013). Hasil penerimaan pajak daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan daerah (Anggoro, 2017; Anisah et al., 2015; Saprudin, 2018; Septriani, 2023; Simanjuntak & Ginting, 2019). Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, daerah diberi peluang untuk mengenakan pungutan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terdapat perluasan basis Pajak Daerah. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan dengan prinsip pajak yang baik.

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa kontraprestasi langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Salah satu pajak strategis sebagai sumber pendapatan negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, atau penguasaan tanah dan bangunan, dengan pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung melainkan kontribusi untuk kemakmuran rakyat. Di Indonesia, sistem pemungutannya menggunakan self-assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sejak 1 Januari 2014, berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dialihkan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota sebagai pajak daerah yang bersifat kebendaan, di mana besaran pajak ditentukan oleh objek (tanah/bangunan) bukan subjek. PBB P2 menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang vital untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Brebes, sebagaimana diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2023, yang menegaskan peran PBB P2 dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes telah menetapkan PBB P-2 sebagai salah satu penerimaan daerah yang cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan kebutuhan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang cukup untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan kepentingan Pemerintah Kabupaten Brebes tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan, pendayagunaan pembangunan nasional serta dapat memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah (Khoiroh, 2017; Sidik, 2012; E. Wahyuni, 2020).

Menurut Robert Putnam (1995), partisipasi masyarakat didorong oleh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap komunitas, yang dalam konteks pembayaran PBB dipengaruhi oleh faktor internal (seperti pengetahuan, kesadaran, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kemampuan finansial) serta faktor eksternal (seperti efektivitas sosialisasi, kualitas layanan publik, dan tekanan sosial). Di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 masih rendah, ditunjukkan oleh ketidakcapaian target dan keterlambatan pembayaran, yang mengindikasikan kurangnya kesadaran masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor penghambat ini, pemangku kepentingan dapat merancang strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan berkelanjutan.

Desa Sitanggal memiliki capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terendah di Kecamatan Larangan, yang disebabkan oleh rendahnya partisipasi dan kesadaran

---

## Eni Listiana, Siti Khumayah, Sri Wulandari

Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes

masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, sehingga target pembayaran sering tidak tercapai tepat waktu (Nurhayati et al., 2025; Puspitasari, 2022; Tamba et al., 2024; Yulistia, 2019). Untuk meningkatkan realisasi PBB-P2, diperlukan upaya penggerakan partisipasi masyarakat melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi intensif, peningkatan pelayanan, dan pendekatan partisipatif, sehingga diharapkan kepatuhan masyarakat meningkat dan target penerimaan pajak daerah dapat terpenuhi (A. Wahyuni, 2011).

Penelitian ini mengkaji "Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Brebes" dengan studi kasus di Desa Sitanggal, bertujuan untuk: (1) mengukur tingkat partisipasi masyarakat, (2) mengidentifikasi faktor penghambat, dan (3) merumuskan solusi peningkatan kepatuhan pajak (Prasetyaningsih, 2016; Sari et al., 2024). Dengan pendekatan baru melalui teori partisipasi masyarakat Robert Putnam, penelitian ini menganalisis sepuluh dimensi (seperti pengetahuan, kesadaran, dan kepercayaan pada pemerintah) yang belum banyak diteliti sebelumnya, menawarkan perspektif sosiologis-perilaku untuk mengatasi masalah rendahnya kesadaran wajib pajak dan ketidakpercayaan institusional, sekaligus mengusulkan solusi inovatif seperti perencanaan pajak partisipatif dan integrasi pembayaran digital, sehingga mengisi celah literatur tata kelola pajak daerah di konteks pedesaan Indonesia (Mardiasmo, 2011; UU No. 28/2009).

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis partisipasi masyarakat Desa Sitanggal dalam membayar PBB P2. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen terkait realisasi pembayaran PBB P2 di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Informan penelitian meliputi Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda Kabupaten Brebes, Kepala Seksi Pemerintahan dan mantri pajak Kecamatan Larangan, perangkat Desa Sitanggal, serta wajib pajak (kepala keluarga). Teknik pengujian data menggunakan triangulasi sumber, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan kondisi aktual partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB P2 yang belum optimal.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tingkat Pendidikan Masyarakat

Di era globalisasi sekarang ini, pendidikan merupakan faktor penting yang harus diutamakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal usia. Bahkan pendidikan itu sendiri menjadi tolok ukur teratas ketika menilai kriteria masyarakat yang menyangkut persoalan kualitas serta produktivitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka akan membawa dampak yang baik terhadap kemajuan di Desa tersebut. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Informasi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini terkait pendidikan masyarakat di Desa Sitanggal :

**Tabel 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sitanggal**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD/Sederajat	4.786
2	Tamat SMP/Sederajat	671
3	Tamat SMA/Sederajat	2.194

## Eni Listiana, Siti Khumayah, Sri Wulandari

Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes

---

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
4	Tamat S1/Diploma	354
5	Buta Huruf	267
6	Putus Sekolah	194

Sumber: RPJM Desa Sitanggal tahun 2019-2025.

### Jumlah dan Mata Pencarian Masyarakat

Jumlah penduduk Desa Sitanggal sebanyak 6.570 jiwa yang terdiri dari 5.570 Kartu Keluarga (KK). Keterangan lebih lanjutnya dapat dilihat dari data penduduk Desa Sitanggal di tabel berikut :

**Tabel 2. Jumlah Masyarakat Desa Sitanggal**

Jumlah Laki-Laki (orang)	4.695
Jumlah Perempuan (orang)	875
Jumlah Total (orang)	6.570
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	5.570
Kepadatan Penduduk (per Km)	0

Sumber: RPJM Desa Sitanggal tahun 2019-2025.

Mata pencarian adalah usaha atau pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk membiayai serta memenuhi kehidupan sehari-hari. Mata pencarian seseorang berkaitan dengan kondisi sosial ekonominya, sehingga menjadi tolak ukur perilaku pribadi dalam kehidupannya. Adapun data mata pencarian pokok masyarakat Desa Sitanggal berdasarkan jumlah penduduk masyarakat, yaitu sebanyak 6.570 jiwa dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3. Mata Pencarian Pokok Penduduk Desa Sitanggal**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS/TNI/POLRI	90
2	Petani/Peternak	4.345
3	Buruh Swasta/Industri	1.488
4	Buruh Bangunan	1.157
5	Pengusaha	15
6	Pedagang	4.257
7	Lainnya	16

Sumber dari RPJM Desa Sitanggal Tahun 2019-2025.

Dapat dilihat dari data pada tabel di atas bahwa sebanyak 4.345 orang masyarakat Desa Sitanggal bekerja sebagai Petani/Peternak. Desa Sitanggal yang memiliki luas tanah sawah/lahan kering 15.000 Ha. Dengan demikian, Desa Sitanggal dapat memanfaatkan perekonomian Desa di bidang

## **Eni Listiana, Siti Khumayah, Sri Wulandari**

Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes

---

pertanian. Menurut hasil observasi peneliti, masyarakat petani Desa Sitanggal memiliki potensi perekonomian dari sektor perkebunan dengan mengandalkan sawah yang ditanam secara merata dan teratur dalam kebun yang terpisah-pisah.

### **Pembahasan**

Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes) Partisipasi Masyarakat yang dikemukakan oleh Robert Putnam (1995) human politik pengembangan dari teori modal sosial menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat didorong oleh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap suatu komunitas. Dalam konteks pembayaran PBB, teori ini dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dengan memahami faktor-faktor ini, pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes), penulis menggunakan teori Partisipasi Masyarakat yang dikemukakan oleh Robert Putnam yang meliputi 10 (sepuluh) Dimensi yaitu Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Kepercayaan Terhadap Pemerintah, tersedia informasi dan layanan, kemampuan finansial, efektivitas, penyuluhan dan sosialisasi, keterlibatan masyarakat, kualitas layanan publik dan tekanan sosial.

### **Pengetahuan dan Pemahaman**

Dimensi Pengetahuan dan Pemahaman dalam Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes) memiliki 2 parameter yaitu :

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang PBB-P2
2. Manfaat membayar PBB-P2

Kondisi yang ada saat ini di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dari hasil wawancara dengan informan adalah pada pemahaman dan pengetahuan pegawai terhadap PBB-P2 adalah sudah baik. Pengetahuan dan pemahaman Masyarakat dalam pajak PBB-P2 juga sudah baik serta baik pegawai dan masyarakat juga telah memahami akan manfaat kita membayar PBB-P2. Dari kondisi wawancara diatas Penulis menyimpulkan bahwa pada dimensi pengetahuan dan pemahaman partisipasi masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes) sudah efektif.

### **Kesadaran**

Dimensi kesadaran dalam Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes) memiliki 3 parameter yaitu:

1. Masyarakat merasa pentingnya membayar PBB-P2
  2. Masyarakat mau membayar pajak
-

## **Eni Listiana, Siti Khumayah, Sri Wulandari**

Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes

---

### 3. Sikap patuh atau mandiri

Kondisi yang ada dari hasil penelitian yang Penulis dapatkan dari informan adalah kesadaran masyarakat masih rendah akan kewajibannya dalam membayar pajak, ketika petugas tidak datang menagih pajak mereka tidak berusaha membayar pajak ke loket-loket yang telah ditentukan. Masih ada juga yang berfikir bahwa untuk apa membayar pajak sedangkan mereka tidak menerima bantuan dari Desa. Krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak dipergunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan pelayanan publik. Dari segi petugas penagihnya juga ketidak disiplin dalam pemungutan pajak.

Bila dibandingkan dengan teori partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh Putnam dengan kondisi yang ada dari hasil penelitian yang Penulis dapatkan dari informan, Penulis menyimpulkan bahwa Dimensi kesadaran pada Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes) masih belum efektif.

#### **Kepercayaan terhadap Pemerintah**

Dimensi kepercayaan terhadap pemerintah terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes) memiliki 3 parameter yaitu:

1. Masyarakat merasa wajib membayar PBB-P2
2. Efektifitas penggunaan dana PBB-P2
3. Perilaku pemerintah yang tercermin

Bila dihubungkan dengan teori partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh Robert Putnam dengan kondisi yang ada saat ini masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan informan yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih sangat rendah hal ini disebabkan oleh salah satunya perilaku petugas yang tidak Amanah dengan memakai uang setoran pajak digunakan untuk keperluan pribadi.

#### **Ketersediaan informasi dan layanan**

Dimensi ketersediaan informasi dan layanan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes) memiliki 3 parameter yaitu:

1. Kemudahan akses informasi tentang PBB-P2
2. Kemudahan proses pembayaran PBB -P2
3. Kemudahan layanan pembayaran.

Faktor Pendukung adanya aplikasi digital untuk pembayaran PBB yang meningkatkan kemudahan bagi masyarakat perkotaan. Program layanan keliling di beberapa daerah berhasil menjangkau masyarakat yang sulit mengakses loket pembayaran.

Kondisi yang ada saat ini ketersediaan informasi dan layanan sudah bagus. Maka didapat kesimpulan bahwa dimensi ketersediaan informasi dan layanan sudah efektif.

#### **Kemampuan Finansial**

Dimensi kemampuan finansial terhadap pemerintah terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes) memiliki 3 parameter yaitu:

1. Keuangan yang memadai
  2. Mampu membayar kewajiban pajak
-

## **Eni Listiana, Siti Khumayah, Sri Wulandari**

Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes

---

### 3. Penghasilan

Kemampuan finansial masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat partisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Analisis ini bertujuan untuk memahami hubungan antara kondisi ekonomi masyarakat dengan kepatuhan mereka terhadap kewajiban membayar PBB. Kemampuan finansial dapat dilihat dari Pendapatan Masyarakat, beban ekonomi, kesesuaian tarif dan Prioritas Pembayaran.

Bila dihubungkan dengan teori yang dikembangkan oleh Robert Putnam dengan kondisi yang di dapat dari wawancara dengan informan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes partisipasi masyarakat belum efektif karena masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan finansial yang memadai atau cukup untuk membayar pajak akan tetapi kesadarannya saja yang kurang dalam membayar pajak tepat waktu.

#### **Efektivitas**

Dimensi Efektivitas terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBB-P2 ) di Kabupaten Brebes ( Studi Kasus di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes) memiliki 4 parameter yaitu :

1. Transparan
2. Tepat Waktu

Kondisi yang terjadi di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes ini untuk Dimensi Efektifitas masih belum efektif karena kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu masih sangat rendah.

#### **Penyuluhan dan sosialisasi**

Dimensi penyuluhan dan sosialisasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes) memiliki 2 parameter yaitu:

1. Tepat sasaran
2. Tingkat Kehadiran

Kondisi yang ada saat ini tentang dimensi penyuluhan dan sosialisasi yaitu penyuluhan masih dilakukan melalui pengajian- pengajian, pertemuan-pertemuan kemasyarakatan belum secara resmi di forum khusus, sasarannya bukan hanya wajib pajak saja akan tetapi seluruh masyarakat sehingga tujuan yang akan dicapai belum maksimal. Berdasarkan uraian diatas Penulis dapat menyimpulkan pada dimensi penyuluhan dan sosialisasi Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini belum efektif.

#### **Keterlibatan Masyarakat**

Dimensi keterlibatan masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes) memiliki 2 parameter yaitu:

1. Tanggungjawab
2. Kontribusi

Kondisi yang terjadi saat ini masyarakat tidak dilibatkan dalam penetapan besaran pajak. Masyarakat hanya menerima ketentuan pajak yang sudah di tentukan oleh pemerintah. Berdasarkan kondisi yang ada hasil dari wawancara dengan informan bila dihubungkan dengan teori partisipasi

---

## **Eni Listiana, Siti Khumayah, Sri Wulandari**

Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes

---

masyarakat yang dicetuskan oleh Robert Putman maka Dimensi keterlibatan masyarakat pada partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 masih belum efektif.

### **Kualitas Layanan Publik**

Dimensi kualitas pelayanan pada partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 memiliki 2 parameter yaitu :

1. Tanggab dan cepat
2. Mudah

Kondisi yang ada saat ini untuk dimensi kualitas pelayanan publik yang ada di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sudah efektif karena pelayanannya cepat tanggab dan mudah.

### **Tekanan Sosial**

Dimensi Tekanan sosial pada partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 memiliki 2 parameter yaitu :

1. Norma sosial
2. Perubahan sikap

Kondisi yang ada dari hasil penelitian kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak patuh, ketika tidak ditagih ya tidak bayar. Kalau pun membayar sudah lewat jatuh tempo dan masih ada oknum penarik pajak yang memakai uang setoran pajak untuk keperluan pribadi, tidak disetorkan ke kas daerah. Sehingga ada salah satu petugas pajak yang menjadi tahanan kejaksaan. Berdasarkan dari hasil penelitian diatas untuk dimensi tekanan sosial pada partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 masih belum efektif.

## **Faktor yang menghambat dan keberhasilan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar PBB-P2 di Desa Sitanggal**

### **Faktor yang menghambat**

Faktor penghambat keberhasilannya adalah: Pada dimensi kesadaran kendalanya kesadaran masyarakat masih rendah akan kewajibannya dalam membayar pajak, ketika petugas tidak datang menagih pajak mereka tidak berusaha membayar pajak ke loket-loket yang telah ditentukan. Masih ada juga yang berfikir bahwa untuk apa membayar pajak sedangkan mereka tidak menerima bantuan dari Desa. Krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak dipergunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan pelayanan publik. Dari segi petugas penagihnya juga ketidak disiplin dalam pemungutan pajak.

Pada dimensi kepercayaan terhadap pemerintah kendala yang dihadapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih sangat rendah hal ini disebabkan oleh salah satunya perilaku petugas yang tidak Amanah dengan memakai uang setoran pajak digunakan untuk keperluan pribadi.

Pada dimensi kemampuan finansial kendalanya adalah masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan finansial yang memadai atau cukup untuk membayar pajak akan tetapi kesadarannya saja yang kurang dalam membayar pajak tepat waktu.

Pada dimensi efektifitas kendalanya adalah kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu masih sangat rendah.

Pada dimensi penyuluhan dan sosialisasi kendalanya adalah penyuluhan masih dilakukan melalui pengajian- pengajian, pertemuan-pertemuan kemasyarakatan belum secara resmi di forum khusus, sasarannya bukan hanya wajib pajak saja akan tetapi seluruh masyarakat sehingga tujuan yang akan dicapai belum maksimal.

---

## **Eni Listiana, Siti Khumayah, Sri Wulandari**

Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes

---

Pada dimensi keterlibatan masyarakat kendalanya adalah masyarakat tidak dilibatkan dalam penetapan besaran pajak. Masyarakat hanya menerima ketetapan pajak yang sudah di tentukan oleh pemerintah.

Pada dimensi kepatuhan sosial kendalanya adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak patuh, ketika tidak ditagih ya tidak bayar. Kalau pun membayar sudah lewat jatuh tempo dan masih ada oknum penarik pajak yang memakai uang setoran pajak untuk keperluan pribadi, tidak disetorkan ke kas daerah. Sehingga ada salah satu petugas pajak yang menjadi tahanan kejaksaan,

### **Faktor Keberhasilan**

Faktor pendukung keberhasilan untuk dimensi pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pajak PBB-P2 juga sudah baik serta baik pegawai dan masyarakat juga telah memahami akan manfaat kita membayar PBB-P2.

Faktor pendukung keberhasilan untuk dimensi ketersediaan Informasi dan layanan kondisi yang ada saat ini ketersediaan informasi dan layanan sudah bagus. Maka didapat kesimpulan bahwa dimensi ketersediaan informasi dan layanan sudah efektif.

Faktor pendukung keberhasilan untuk dimensi kualitas pelayanan publik yang ada di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes adalah karena pelayanannya cepat tanggap dan mudah.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan partisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sitanggal

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kunci dan pendukung, maka diperoleh hasil bahwa upaya-upaya untuk mengatasi hambatan partisipasi dalam membayar pajak PBB-P2 dengan Pada dimensi kesadaran, dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak tentang kewajiban, manfaat dan pentingnya kita membayar PBB-P2, menyampaikan informasi yang sejelas jelasnya apabila petugas tidak datang menagih pajak kita dapat membayar pajak melalui loket-loket yang telah ditentukan. Kemudian selalu mengingatkan kepada petugas penagih pajak agar datang kepada wajib pajak tepat waktu.

Pada dimensi kepercayaan upaya yang dilakukan yaitu dengan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahwa pajak yang dibayarkan akan disampaikan ke kas daerah.

Pada dimensi kemampuan finansial upaya yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi akan pentingnya kita membayar pajak dan memberikan penjelasan manfaatnya bagi kita.

Pada dimensi efektifitas upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi akan pentingnya kita membayar pajak dan memberikan penjelasan manfaatnya bagi kita .

Pada dimensi penyuluhan dan sosialisasi upaya yang dilakukan dengan upaya yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi/ pelatihan secara khusus dengan sasaran peserta wajib pajak.

Pada dimensi keterlibatan masyarakat upaya yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk ikut menyusun besaran pajak, sering mengajak diskusi- diskusi dengan masyarakat yang membahas tentang PBB-P2.

Pada dimensi kepatuhan sosial upaya yang dilakukan dengan memberikan reward bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu dan bagi petugas penagih pajak melakukan penagihan rutin dan terjadwal.

Upaya lain yaitu dengan menyediakan kanal setoran pembayaran pajak yang didekatkan seperti Indomaret, Alfamaret, BRI, BNI, Bank Jateng dan petugas-petugas pemungut pajak daerah seperti

---

## **Eni Listiana, Siti Khumayah, Sri Wulandari**

Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes

---

perangkat desa dan petugas dari Kecamatan (manpa). Ada juga kanal pembayaran PBB lainnya yang diberdayakan oleh pemerintah setempat yaitu KRING PAJAK (Terjadwal) yang artinya pemerintah menetapkan jadwal pemungutan pajak masal di suatu tempat dan masyarakat berbondong-bondong ke tempat dibukanya layanan pembayaran pajak (contoh pembayaran pajak di rumahnya bapak kadus atau bapak kaur). Bagi petugas pemungut pajak memberikan contoh perilaku baik dengan bersikap Jujur dan Tanggungjawab dalam Layanan Publik. Menyusun Standar Operasional Prosedur dalam Partisipasi membayar Pajak, dimana didalamnya ada mekanisme yang harus dilakukan, dan jika ada wajib pajak yang datang tetap harus dilayani walaupun bukan wilayahnya yang ditetapkan. Perencanaan yang baik dan tersistem akan memperbaiki pelaksanaan dalam wajib pajak membayar pajak PBB-P2. Memperkuat koordinasi dan membuat fakta integritas antara pemungut pajak di level desa dan launching bersama perwakilan wajib pajak bahwa Desa Sitanggal akan lunas tepat waktu pada bulan Agustus 2025;

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sitanggal dalam membayar PBB P2 menunjukkan pemahaman yang baik tentang pajak namun kesadaran yang masih rendah, dimana masyarakat cenderung tidak membayar tanpa adanya penagihan petugas dan mempertanyakan manfaat pembayaran pajak. Faktor utama penghambat adalah rendahnya kesadaran akan kewajiban pajak, sementara upaya perbaikan difokuskan pada sosialisasi intensif tentang pentingnya PBB P2, klarifikasi mekanisme pembayaran mandiri di loket, serta peningkatan kedisiplinan petugas penagih. Untuk penelitian selanjutnya disarankan tujuh arahan pengembangan: (1) studi komparatif dengan desa berkinerja pajak lebih baik, (2) evaluasi efektivitas metode sosialisasi, (3) analisis dampak transparansi penggunaan pajak, (4) pengujian sistem penagihan berbasis teknologi, (5) eksplorasi peran tokoh masyarakat, (6) kajian dampak insentif/sanksi, dan (7) pengembangan model perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam penggunaan dana pajak untuk meningkatkan pemahaman atas manfaat langsung kontribusi mereka.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Anisah, H., Torong, Z. B., & MM, A. (2015). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera (Periode 2011-2013)*. Universitas Sumatera Utara.
- Khoiroh, N. (2017). *Pengaruh sanksi, sosialisasi, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gandaria*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nur, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 78–88.
- Nurhayati, N., Handayani, R., & Febriadi, H. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 748–761.
- Panawan, A. R., & Kitta, S. (2023). Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Ezenza Journal (Ej)*, 2(2), 141–153.
- Prakosa, K. B. (2014). Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 8(2).
-

## Eni Listiana, Siti Khumayah, Sri Wulandari

Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Brebes

---

- Prasetyaningsih, D. (2016). *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penerapan self assessment system (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)*.
- Puspitasari, M. D. (2022). *Tinjauan Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Melalui Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Magelang*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Putra, P. G. M., & Ulupui, I. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(3), 863–877.
- Riduansyah, M. (2013). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 7(2), 49–57.
- Saprudin, S. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, terhadap Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Accounting Journal*, 1(1), 47–58.
- Sari, W. K., Setyowati, M. S., Bilisanimar, A., & Putri, Y. P. (2024). Mengupas Kebutuhan Penyuluh Pajak Daerah: Eksplorasi Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 10(1), 171–184.
- Septriani, S. (2023). Analisis pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 884–894.
- Sidik, M. (2012). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah Disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung*, 10.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194.
- Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146–162.
- Wahyuni, A. (2011). Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment System. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 1(1).
- Wahyuni, E. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Yulistia, Y. (2019). Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Efektifitas Target Penerimaan PBB (studi Kasus Nagari Timbulun Kab. Sijunjung). *JEBI/ Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, 14(1), 33–40.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).